

Pemanfaatan Sumber Energy Setempat Guna Pengadaan PLTA (*Micro-Hydro*) Berbasis Partisipasi Masyarakat

Hikmah Kurrota 'Ainin¹

Universitas Negeri Yogyakarta
Hikmahkurrota.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa Sidoluhur dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian dalam tulisan ini dilakukan di desa Sidoluhur Kecamatan Godean, Sleman, DIY. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa Sidoluhur yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap proses namun hanya antusias dalam tataran perencanaan. Disini peran pemerintah dibutuhkan, bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: *Pengembangan, Partisipasi, Masyarakat.*

Utilization Of Local Energy Sources For PLTA Procurement (Micro-Hydro) Based On Community Participation

Abstract

This study aims to examine the involvement of local communities in the development of Sidoluhur village and formulate a model of tourism village development that prioritizes local community participation. The research in this paper was conducted in Sidoluhur village, Godean sub-district, Sleman, DIY. Data collection is done by literature study, in-depth interviews and non-participant observation. The analytical method used is descriptive analysis. This paper shows that the development of Sidoluhur village involves local communities in every process but is only enthusiastic at the planning level. Here the role of the government is needed, when referring to a clean and sustainable approach to governance, the role of the government is expected to be a facilitator by providing greater roles and benefits to local communities. The government's political will is needed to reduce its role in developing tourism villages by opening up space for people to participate.

Keywords: Development, Participation, Community

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan energi masyarakat ternyata tak sejalan dengan produksi listrik yang dihasilkan PLN. Mati lampu secara bergiliran adalah buktinya. Diukur dari tingginya intensitas energi nasional, Indonesia memang tergolong

boros. Secara relatif, Indonesia mengeluarkan 482 TOE (ton oil equivalent). Bandingkan dengan Malaysia (439 TOE), atau negara-negara yang lebih maju dan tergabung dalam OECD yang hanya 164. Padahal di wilayah ini ada musim dingin yang membutuhkan energi untuk

penghangat ruangan. Bukan saja boros, sebaran penggunaannya tidak merata. Pelayanan listrik baru menjangkau permukiman di perkotaan, sementara wilayah pelosok masih banyak yang belum terjangkau listrik. Rasio elektrifikasi, Indonesia saat ini baru mencapai angka 58 persen. Dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, berarti masih ada sekitar 105 juta penduduk yang tidak mendapat pelayanan energi listrik. Khusus di wilayah Jawa Barat saja, masih ada sekitar 4 juta keluarga yang belum menikmati terangnya listrik di rumah mereka. Faktor sulitnya akses serta rendahnya feasibilitas pemasangan jaringan ke pelosok terpencil adalah salah satu penyebabnya.

Terdapat macam macam tenaga yang dapat membangkitkan listrik seperti Air, Uap, Nuklir, dan Angin. Di Indonesia sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih menjadi supplier terbesar untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia. Saat ini mulai digagas pembangkit listrik namun dalam skala kecil yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTA). Konsep ini berbasis pada teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro (PLTA). Istilah mikrohidro biasanya dipakai untuk pembangkit listrik yang menghasilkan output di bawah 500 KW, sementara minihidro untuk output 500 KW-1 MW. Lebih besar dari itu biasa disebut dengan PLTA. PLTA ini merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat menembus keterbatasan akses transportasi, teknologi, hingga biaya. Potensi pengembangan PLTA di Indonesia juga masih sangat terbuka. Dari seluruh 75.000 MW potensi kelistrikan tenaga air, 10 persen, atau 7.500 MW bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saat ini, yang baru dimanfaatkan baru sebesar 60 MW. Sumber energi yang dihasilkan PLTA ini merupakan sebuah alternatif yang menggunakan teknologi sederhana.

Setiap desa memiliki potensi sumber daya alam yang unik untuk pembangkit energi listrik atau sumber energi setempat (SES). Potensi SES ini umumnya berskala kecil dan tersebar,

sehingga jika menggunakan kriteria komersial, potensi ini tergolong tidak layak dikembangkan. Setiap daerah mempunyai karakteristik SES yang berbeda, ada yang memiliki sumber air, ada pula yang memiliki potensi angin, bahkan ada yang memiliki potensi surya. Salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia adalah air. Desa Sidoluhur memiliki Sumber Energi Setempat (SES) berupa air, selama ini air yang terdapat di Sidoluhur digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi pertanian. Dalam kurun waktu dua tahun ini masyarakat lebih inovatif untuk memanfaatkan SES yang ada, dengan menggunakan tanah milik desa masyarakat memanfaatkannya untuk dijadikan kolam ikan terpadu yang juga terdapat pendopo untuk membahas tentang pengembangan pemanfaatan SES. Dalam implementasinya masyarakat selain melibatkan praktisi yaitu Bapak Suryadi selaku warga desa setempat, mahasiswa juga ikut andil dalam proses pengembangan tersebut. Saat ini mahasiswa telah melakukan beberapa kali kegiatan terkait menyiapkan pemuda setempat yang peka terhadap perubahan.

Perubahan ini diharapkan mampu menunjang inovasi yang dilakukan oleh praktisi yaitu berupa pembuatan PLTA Micro-hydro. Di Indonesia sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih menjadi supplier terbesar untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, Saat ini mulai digagas pembangkit listrik namun dalam skala kecil yaitu PLTA (Micro-hydro). Konsep ini berbasis pada teknologi pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro. Istilah Micro-hydro biasanya dipakai untuk pembangkit listrik yang menghasilkan output di bawah 500 KW, sementara minihidro untuk output 500 KW-1 MW. Lebih besar dari itu biasa disebut dengan PLTA. PLTA Micro-hydro ini merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat menembus keterbatasan akses transportasi, teknologi, hingga biaya. Potensi pengembangan PLTA (Micro-hydro) di Indonesia juga masih sangat terbuka. Dari seluruh 75.000 MW potensi kelistrikan tenaga air, 10 persen, atau 7.500

MW bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga Micro-hydro, saat ini yang dimanfaatkan baru sebesar 60 MW. Sumber energi yang dihasilkan PLTA (Micro-hydro) ini merupakan sebuah alternatif yang menggunakan teknologi sederhana.

Partisipasi masyarakat merupakan hal sangat penting dalam perubahan yang terjadi, bahkan dalam pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan masyarakat. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa yang akan dikembangkan. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu potensi menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Keith Davis (2010) menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan mental dan emosi merupakan hal yang paling penting dalam partisipasi dan kemudian akan timbul rasa ikut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut. Verhangen dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus

dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

H.A.R. Tilaar, (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. (dalam Rizuan Ramadhan, 2013) dari penjelasan pengertian ini dijelaskan Partisipasi merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam mendukung suatu pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengapresiasi pendapat mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam partisipasi ini masyarakat dituntut agar masyarakat menunjukkan kepedulian mereka dalam menjaga lingkungan sekitar mereka yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan menjadi satu pengertian yang menjelaskan keikutsertaan dan keterlibatan yang menjadi subjek pelaku yang beraktivitas adalah seseorang atau kelompok interaksi dan komunikasi yang timbul dari keterlibatan mental dan emosi terhadap suatu kondisi untuk mencapai suatu tujuan yang memerlukan kerjasama dan rasa tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu keikutsertaan maupun keterlibatan seseorang (individu) tersebut berhubungan dengan masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat. Menurut Hetifah Sj. Soemanto (2005) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang 16 kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”. Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan disini berarti luas, bukan hanya individu namun juga mementingkan relasi sosial antar subjek sehingga terbentuk sinergi yang akan mendorong keterlibatan semua potensi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian secara mendalam atau intensif terhadap satu anggota dari suatu kelompok sasaran sebagai subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data diperoleh dengan menggunakan purposive sampling, yaitu mengidentifikasi partisipan yang dapat memberikan informasi menyeluruh dan membantu didalam memberikan informasi dan pemahaman fenomena yang terjadi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat pada Tataran Perencanaan

Parameter yang digunakan untuk menentukan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Tulisan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sidoluhur mengaku dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan penetapan daerah *sample* dan lokasi dibangun mikrohidro. Mereka diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal dalam sebuah sosialisasi teknologi tepat guna yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan desa.

Hal ini terjadi, karena (1) gagasan pengembangan desa dilakukan oleh pemerintah desa karena menggunakan dana desa, karena masyarakat yang memahami karakter desa. (2) masyarakat lokal diharapkan mampu turut berpartisipasi hingga implementasi dan ikut memantau keberhasilan program nantinya. (3) keputusan sepenuhnya berada pada pemerintah desa yang disepakati bersama oleh tokoh masyarakat desa. Namun partisipasi ini masih bersifat semu karena masih pada tahap pelaksanaan yang belum menginjak tataran implementasi yang membutuhkan *support* materi maupun non materi. Keuntungan yang diperoleh dari bentuk partisipasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat lokal langsung ditanggapi oleh pemerintah desa.

Substansi dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Sidoluhur diharapkan selalu bersifat aktif dan langsung. Dalam hal keaktifan masyarakat Desa Sidoluhur, penelitian menemukan bahwa kehadiran warga dalam pertemuan desa cukup antusias. Walaupun warga masyarakat banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, pada umumnya mereka mengaku terlibat dalam pengambilan keputusan perihal pengembangan desa. Dalam hal keterwakilan masyarakat pada rapat-rapat, biasanya perangkat desa hanya mengundang beberapa warga yang merupakan perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya berjumlah 50 orang.

2. Partisipasi Masyarakat pada Tataran Perencanaan Implementasi

Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan titik percontohan area mikrohidro yang berada di dusun Munengan, misalnya, sebagai pengelola perikanan, pengelolaan tata ruang, pembentukan karakter pemuda, mempersiapkan ibu-ibu untuk

mempersiapkan olahan nila yang menjadi ikon dari dusun munengan,. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha berskala kecil.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nanti akan ada partisipasi masyarakat luar yang memonopoli usaha berskala besar. Hal tersebut terjadi karena penyebabnya adalah peluang usaha dipandang selalu membutuhkan modal yang besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Masyarakat Sidoluhur dengan kompetensi bisnis yang rendah dan keterbatasan modal selalu berfikir mereka tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. Selain urang lebu 6 orang yang benar-benar mengimplementasikan rencana tersebut. Hal itu dimulai dengan menyiapkan bendungan mini dan kolam-kolam yang nantinya menjadi tempat dari PLTA (Mikrohidro) tersebut.

Tidak ada upah yang diterima oleh 6 orang tersebut, hanya saja mereka berhasil memanfaatkan lahan milik desa dan memanfaatkan kolam tersebut untuk dijadikan kolam pembibitan dan pengembangan ikan nila yang sakarang memasuk kebutuhan ke beberapa rumah makan. Selain itu dalam wujud implementasi yang berada di dusun munengan juga menggandeng mahasiswa dari Pendidikan Luar Sekolah UNY untuk turut memberikan pelatihan dan saran pengembangan. Dengan adanya kerjasama ini para mahasiswa mulai merangkul karang taruna, dan kelompok PKK yang ada di dusun Munengan dengan memberikan ketrampilan guna meningkatkan kapasitas pemuda dan masyarakat di dusun tersebut. Selain itu dengan menambah intensitas kunjungan ke titik percontohan diharapkan mereka memiliki kepedulian dan mau berpartisipasi aktif guna mewujudkan tujuan bersama.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan dan menjadi tanggung jawab desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Badan usaha milik desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, dan berbadan hukum. Salah satu usaha BUMDES dikelola oleh POKDARWIS (kelompok sadar wisata). Tujuan utama didirikan POKDARWIS adalah mewujudkan desa edukatif berbasis potensi alam dan kearifan lokal. Dalam rangka mewujudkan desa sedo luhur yang edukatif maka harus didukung oleh peran aktif dari masyarakat. Peran masyarakat mulai dari merencanakan program kemudian melaksanakannya hingga melakukan pengawasan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang mengetahui dengan baik kondisi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki desa sedo luhur. Peran aktif masyarakat agar kondisi atau kelestarian daerah tetap terjaga dengan baik.

Melihat dari salah satu potensi alam yang dimiliki desa sedo luhur yakni mata air nya, maka program-program yang dapat dilaksanakan oleh POKDARWIS adalah

pemanfaatan air sebagai irigasi, menjadikannya sebagai produk ekonomi yaitu usaha air minum sedo luhur, serta menjadikan air sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Desa sidoluhur menjadi daerah yang sangat memungkinkan untuk dihidirkannya PLTA. Hal tersebut disebabkan karena debit air yang mengalir cukup kuat. Prototype PLTA yang sedang disempurnakan oleh Pak Suryadi dapat menghasilkan listrik sebesar 5000 watt sampai 10.000 watt dengan perhitungan: 1) untuk tenaga 5000 watt dapat mengalir 5 rumah untuk keperluan lampu, setrika, tv, dan kulkas. 2) untuk tenaga 10.000 watt dapat mengalir 10 rumah untuk keperluan lampu, setrika, tv, dan kulkas.

Target jangka panjang adalah dapat memenuhi kebutuhan listrik desa sedo luhur. Akan tetapi untuk mencapainya secara bertahap dan dukungan dari masyarakat. PLTA menjadi industri yang dimiliki oleh POKDARWIS dibawah BUMDES. Hasil atau laba dari PLTA ini akan masuk ke dalam kas desa yang pada akhirnya akan masuk ke pendapatan negara. Konsep usaha yang dilakukan oleh POKDARWIS merupakan konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya POKDARWIS memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan mewariskan kondisi alam yang masih baik kepada generasi kedepan.

SIMPULAN

Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan namun sangat kurang pada tataran implementasi. Jika mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, hal ini dapat diatasi dengan melibatkan peran pemerintah yang diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini.

Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek pembangunan. Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Sidoluhur telah diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Selama ini pariwisata yang dikembangkan di desa Sidoluhur tersebut di desain oleh mereka pada tahap perencanaan. Pariwisata yang dikembangkan didesain mendapatkan bantuan dari orang luar desa, yaitu mahasiswa PLS UNY.

Pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk menjamin hal itu diperlukan kemauan masyarakat sendiri untuk menambah perannya dalam pengembangan desa dan memberikan peranan yang lebih besar kepada desanya dengan turut berpartisipasi. Selama ini masyarakat terbiasa memberikan saran dan menyumbang ide saat perencanaan namun pada kenyataannya pada proses implementasi hanya segelintir orang yang terlibat, bahkan bisa dibilang pihak luar lebih

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Davis, Keith. 2010. Organizational Behavior – Human Behavior at Work 13th Edition. New Delhi: Mcgraw Hill Company
- H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Rinika Cipta.
- Hetifah, SJ Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K, 2006, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta
- Totok Mardikanto 2003, Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta : UNS PRESS.
- Wearing . 2001 . Deficiencies Of Local Communities Or The Environment.